



PENDAFTARAN PTPS KEMBALI DIPERPANJANG

Faktor Keamanan Dominasi Kerawanan TPS

YOGYA (KR) - Bawaslu Kota Yogya berupaya memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak dini agar memudahkan antisipasi. Faktor keamanan menjadi potensi kerawanan yang paling dominan.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Yogya Tri Agus Inharto, setiap wilayah yang pernah terjadi konflik maka memunculkan potensi kerawanan menyangkut keamanan.

"Seperti di Ngampilan, Gondomanan serta Kotagede, masuk dalam pemetaan kami dari sisi kerawanan keamanannya. Apalagi persaingan antarcaleg di internal parpol juga semakin kuat, sehingga keamanan TPS harus diperhatikan," tandasnya, Kamis (28/2).

Selain masalah keamanan, faktor lain yang menjadi potensi kerawanan di TPS

ialah dinamika kependudukan serta sumber daya manusia penyelenggaranya. Tiga faktor tersebut saat ini tengah dialami hingga titik TPS di setiap kecamatan. Dengan begitu, Bawaslu Kota Yogya akan mengupayakan langkah-langkah pencegahan agar potensi kerawanannya dapat dicegah.

Tri Agus Inharto menambahkan, pihaknya sudah berupaya melakukan berbagai antisipasi. Di antaranya meminta setiap Panwaslu Kecamatan untuk gencar melakukan sosialisasi

menyangkut regulasi hingga pendekatan ke tokoh masyarakat agar mengedepankan suasana kondusif. "Proses kampanye masih berjalan. Harapan kami masa kampanye tetap kondusif agar saat pemungutan suara di TPS juga berjalan aman, tertib dan lancar," urainya.

Selain mengintensifkan peran Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota Yogya juga akan memaksimalkan tugas Pengawas TPS (PTPS). Hanya, hingga saat ini jumlah PTPS masih belum mencapai kebutuhan. Pihaknya pun terpaksa memperpanjang kembali pendaftaran PTPS hingga 4 Maret 2019 mendatang. Dari total 1.373 TPS di Kota Yogya, masing-masing dibutuhkan satu orang PTPS sehingga kebutuhannya mencapai 1.373 orang.

"Kemarin sempat kami perpanjang, namun jumlah pendaftarannya masih kurang. Sekarang kami perpanjang lagi sembari meminta tokoh setempat untuk mendelegasikan wakilnya menjadi PTPS. Apalagi dalam aturan baru, PNS akhirnya diperbolehkan menjadi PTPS karena ketugasannya kan profesional," jelas Tri Agus Inharto.

Oleh karena itu, agar berbagai persoalan di TPS kelak tidak berkepanjangan, Bawaslu Kota Yogya saat ini juga tengah menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa cepat. Terutama masalah teknis seperti selisih suara di TPS, berita acara yang kurang benar dan lainnya, harapannya dapat dituntaskan saat itu juga. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005